PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nov | Des   2015   Hal. : 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

BPK Periksa Kesiapan Basis Akrual

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat segera melaksanakan pemeriksaan terhadap kesiapan penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah. Saat ini baru tujuh pemerintah daerah yang sudah dilakukan pemeriksaannya, sedangkan delapan lainnya belum dilakukan.

"Kami berharap pemerintah daerah yang belum dilakukan pemeriksaan dapat menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk kelancaraan pemeriksaan tersebut," ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Didi Budi Satrio dalam penyampaian LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (sampai triwulan III) pada Pemprov Kalbar dan Kubu Raya, Jumat (6/11).

Didi menjelaskan ada tiga aspek pendukung dalam pemeriksaan itu

◆Ke Halaman 15 kolom 5

BPK Periksa Kesiapan Basis Akrual

Sambungan dari halaman 9

yakni aspek komitmen, regulasi, dan kebijakan, aspek pengelolaan sumber daya manusia, dan aspek pengelolaan teknologi informasi. Secara umum pemeriksaan pada Pemprov Kalbar dan Pemkab Kubu Raya menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan upaya pengimplementasian penerapan standar akuntasi pemerintah berbasis akural. Tetapi hasilnya belum sepenuhnya efektif. Ada hal-hal yang harus diperbaiki. Salah satunya data kepegawaian yang belum update. Tugas pengelola teknologi dan informasi belum diuraikan secara jelas.

"Sengaja kami mengundang juga pemerintah kabupaten lainnya karena diharapkan hasil pemeriksaan ini bisa menjadi masukan bagi pemda lainnya. Pemda lain juga harus mempersiapkan diri karena penerapan sistem akrual basis harus dilaksanakan dalam menyusun LKPD Tahun 2015," ungkap Didi.

Didi mengatakan pihaknya juga menyerahkan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2014 pada Pemprov dan pemerintah kabupaten kota di Kalbar. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik memiliki lingkup terbatas.

Mohon hal ini bisa disampaikan kepada partai politik di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Paling lambat akhir Januari tahun depan, laporan keuangan 2015 sudah harus disampaikan kepada BPK RI

"Pemeriksaan ini menggunakan prosedur analitis, sehingga kesimpulan yang BPK berikan hanya atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2014," katanya.

Kepala Subauditorat Kalbar I BPK RI, Patrice Lumumba Sihombing menuturkan pemeriksaan laporan keuangan pada tahun depan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini merujuk pada Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan itu menyebutkan partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya satu bulan setelah berakhir tahun anggaran akan dikenakan sanksi. Sanksinya yakni BPK tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap partai politik tersebut. Konsekuensinya bantuan pada tahun berjalan kepada parpol bersangkutan dihentikan sementara.

"Mohon hal ini bisa disampaikan kepada partai politik di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Paling lambat akhir Januari tahun depan, laporan keuangan 2015 sudah harus disampaikan kepada BPK RI," kata Patrice.

Perbedaan lainnya berkaitan dengan metode pemeriksaan. Pada tahun sebelumnya pemeriksaan tidak dilakukan secara mendalam dan tidak melakukan pemeriksaan fisik. Tetapi pada tahun depan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. "Jika menurut pemeriksaan kami ada yang fiktif, tetap akan dikembalikan ke kas daerah. Jika dilihat kondisi permasalahannya kompleks, bisa disampaikan ke aparat penegak hukum," ungkap Patrice.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI akan ditindaklanjuti. "Perlu waktu 60 hari dan kami akan tindaklanjuti. Sekarang ini seperti yang diinginkan, jajaran pengelolaan keuangan harus benar-benar sesuai aturan," ungkap Christiandy. ***(uni)***